

BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 17A TAHUN 2016

TENTANG

REVISI STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya efisien dan efektif dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu adanya standard biaya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14C, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang-barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang-Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standard Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 tahun 2014 tentang pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Pesisir Barat;
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG REVISI STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016**

**Pasal 1**

Standar Biaya Tahun 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini

**Pasal 2**

Standar Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016

**Pasal 3**

Susunan Kode Rekening Urusan Pemerintahan Daerah, Kode Organisasi, Kode Akun Keuangan Daerah, Kode Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta Kode Rekening adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini

**Pasal 4**

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 3 Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak ditandatangani agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 2. Maret 2016  
**BUPATI PESISIR BARAT.**

**AGUS ISTIOLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 2016  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**FREDY SM**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR**



		3) Biaya Pembelian Pelumas - Kendaraan Roda 4 - Kendaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 3  - Pelumas Bus Sekolah - Bus Pemda - Kendaraan Dinas Tamu Pemda - Kendaraan Pick Up - Filter Oli Bus Sekolah - Oli Gardang dan Porseneling Bus Sekolah  - Pelumas Damkar - Filter Oli Damkar - Oli Gardang dan Porseneling Damkar  - Pelumas Truck (Sampah dan Sejenisnya) - Filter Oli Truck (Sampah dan Sejenisnya) - Oli Gardang dan Porseneling Truck (Sampah dan Sejenisnya)	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun  Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun  Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	9,000,000 200,000 300,000  7,200,000 6,000,000 12,000,000 3,000,000 400,000 600,000  7,200,000 400,000 600,000  7,200,000 400,000 600,000	
		4) Pembelian Accu - Kendaraan Roda 4 - Kendaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 3 - Bus Sekolah - Bus Pemda - Kendaraan Dinas Tamu Pemda - Kendaraan Pick Up - Damkar - Truck (Sampah dan Sejenisnya)	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	1,000,000 200,000 300,000 1,200,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,200,000 1,200,000	
		5) Pembelian Ban - Kendaraan Roda 4 - Kendaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 3 - Bus Sekolah - Bus Pemda - Kendaraan Dinas Tamu Pemda - Kendaraan Pick Up - Damkar - Truck (Sampah dan Sejenisnya)	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	5,000,000 500,000 1,500,000 12,000,000 17,600,000 17,600,000 8,800,000 12,000,000 12,000,000	
6	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI SEKRETARIS KABUPATEN DAN DPRD	3) BUPATI a. Biaya Service, Reparasi dan penggantian suku cadang b. Biaya Pembelian BBM c. Biaya pembelian pelumas d. Pembelian Accu e. Pembelian Ban  2) WAKIL BUPATI a. Biaya Service, Reparasi dan penggantian suku cadang b. Biaya Pembelian BBM c. Biaya pembelian pelumas d. Pembelian Accu e. Pembelian Ban  3) SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN a. Biaya Service, Reparasi dan penggantian suku cadang b. Biaya Pembelian BBM/Premix c. Biaya pembelian pelumas d. Pembelian Accu e. Pembelian Ban  4) DPRD - Mobil Ketua DPRD a. Biaya Service, Reparasi dan penggantian suku cadang b. Biaya Pembelian BBM c. Biaya pembelian pelumas d. Pembelian Accu e. Pembelian Ban  5) - Wakil Ketua DPRD a. Biaya Service, Reparasi dan penggantian suku cadang b. Biaya Pembelian BBM d. Biaya pembelian pelumas e. Pembelian Accu f. Pembelian Ban  6) - Selain Ketua dan Wakil Ketua DPRD a. Biaya Service, Reparasi dan penggantian suku cadang b. Biaya Pembelian BBM d. Biaya pembelian pelumas e. Pembelian Accu f. Pembelian Ban	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun  Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun  Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun  Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun  Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun  Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	30,000,000 48,000,000 15,000,000 1,250,000 24,000,000  10,000,000 48,000,000 15,000,000 1,250,000 24,000,000  10,000,000 36,000,000 12,000,000 1,250,000 24,000,000  15,000,000 27,600,000 9,600,000 1,904,000 9,000,000  8,000,000 27,600,000 9,600,000 1,904,000 9,000,000  5,000,000 27,600,000 5,400,000 1,250,000 5,000,000	
7	PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	1 Pemeliharaan Genset (termasuk Sparepart) 2 Pemeliharaan Komputer/Laptop/Printer 3 Pemeliharaan AC 4 Pemeliharaan Mesin Tik	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	5,000,000 750,000 500,000 75,000	
8	SEWA RUMAH JABATAN/GUDANG/RUMAH DINAS/RUANG KAPAT/PERTEMUAN	SEWA RUMAH JABATAN/DINAS 1 Sewa Rumah Jabatan Bupati 2 Sewa Rumah Jabatan Wakil Bupati	Unit/Tahun Unit/Tahun	65,000,000 55,000,000	
9	SEWA MOBIL JABATAN	SEWA MOBIL JABATAN 1 Sewa Mobil Jabatan Bupati	Unit/Bulan	20,000,000	
10	SEWA KANTOR/ GUDANG/ RUMAH DINAS PEJABAT	SEWA KANTOR/ GUDANG/ RUMAH DINAS PEJABAT  1 Sewa Rumah Dinas Sekretaris Daerah 2 Sewa Rumah Dinas Asisten 3 Sewa Rumah Dinas Staf Ahli 4 Sewa Kantor PKK/Dharma Wanita 5 Sewa Rumah Eselon II 6 Sewa Rumah Eselon III Kepala Kantor 7 Sewa Kantor 8 Sewa Gudang 9 Sewa Ruang Rapat/Peremuan 10 Sewa Gedung Serba Guna	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Per Hari Per Hari	44,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 25,000,000 10,000,000 10,000,000 350,000 450,000	
11	SEWA KENDARAAN OPERASIONAL	SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 1 Eselon II 2 Eselon III (Kepala SKPD) 3 Eselon III (Kabag/Sekretaris/Arben) 4 Eselon III (Kabid PPKAD)	Unit/Bulan Unit/Bulan Unit/Bulan Unit/Bulan	5,000,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000	



		<p>3 Nilai Pagu pengadaan di atas Rp. 1 Milyar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua op 350,000</li> <li>- Sekretaris op 300,000</li> <li>- Anggota op 250,000</li> </ul>		
		<p>PANITIA PENGADAAN BARANG</p> <p>1 Nilai Pagu pengadaan di atas Rp. 200 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua op 200,000</li> <li>- Sekretaris op 175,000</li> <li>- Anggota op 150,000</li> </ul> <p>2 Nilai Pagu pengadaan di atas Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 1 milyar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua op 250,000</li> <li>- Sekretaris op 225,000</li> <li>- Anggota op 200,000</li> </ul> <p>3 Nilai Pagu pengadaan di atas Rp. 1 Milyar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua op 300,000</li> <li>- Sekretaris op 275,000</li> <li>- Anggota op 250,000</li> </ul> <p>PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTASI</p> <p>1 Nilai Pagu pengadaan di atas Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 100 Juta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua op 150,000</li> <li>- Sekretaris op 125,000</li> <li>- Anggota op 100,000</li> </ul> <p>2 Nilai Pagu pengadaan di atas Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 250 juta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua op 200,000</li> <li>- Sekretaris op 175,000</li> <li>- Anggota op 150,000</li> </ul> <p>3 Nilai Pagu pengadaan di atas Rp. 250 juta sampai dengan Rp. 500 juta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua op 250,000</li> <li>- Sekretaris op 225,000</li> <li>- Anggota op 200,000</li> </ul> <p>4 Nilai Pagu pengadaan di atas Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 1 milyar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua op 300,000</li> <li>- Sekretaris op 275,000</li> <li>- Anggota op 250,000</li> </ul> <p>5 Nilai Pagu pengadaan di atas Rp. 1 Milyar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua op 350,000</li> <li>- Sekretaris op 325,000</li> <li>- Anggota op 300,000</li> </ul>		
21	PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN	<p>PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN</p> <p>1 Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya sampai dengan 200 juta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat Penerima op 150,000</li> </ul> <p>2 Pengadaan Jasa Konsultasi sampai dengan Rp. 50 juta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat Penerima op 150,000</li> </ul> <p>3 Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya di atas 200 juta sampai dengan 500 juta atau Jasa Konsultasi di atas 200 juta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua op 200,000</li> <li>- Sekretaris op 175,000</li> <li>- Anggota op 150,000</li> </ul>		
22	HONORARIUM TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengarah/Pembina/Penasehat Orang / Bulan 300,000</li> <li>- Penanggung Jawab Orang / Bulan 175,000</li> <li>- Wakil Penanggungjawab Orang / Bulan 275,000</li> <li>- Koordinator Orang / Bulan 250,000</li> <li>- Ketua/Wakil Ketua Orang / Bulan 250,000</li> <li>- Sekretaris Orang / Bulan 200,000</li> <li>- Anggota Orang / Bulan 150,000</li> </ul> <p>Honorarium Tim Iuri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua Tim Orang / Bulan 150,000</li> <li>- Sekretaris/Anggota Tim Orang / Bulan 100,000</li> </ul>		
23	INSENTIF GURU NGAJI, IMAM MASJID, PPPN, GURU SEKOLAH NON MUSLIM	<p>1 Guru Ngaji Orang/Bulan 200,000</p> <p>2 Guru Sekolah Non Muslim Orang/Bulan 200,000</p> <p>3 Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (PPN)/ Muslim - Non Muslim Orang/Bulan 200,000</p> <p>4 Imam Masjid Orang/Bulan 200,000</p>		
24	INSENTIF KEPALA LINGKUNGAN KELURAHAN	<p>1 Kepala Lingkungan Orang/Bulan 450,000</p>		
25	HONORARIUM KEPALA TERMINAL	<p>1 Petugas Terminal Way Baru Orang/Bulan 600,000</p> <p>2 Petugas Bandara Seray Orang/Bulan 750,000</p> <p>3 Petugas Sahbandar Orang/Bulan 750,000</p>		
26	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	<p>Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Penanggungjawab Orang / Bulan 4,500,000</li> <li>b Wakil Penanggungjawab Orang / Bulan 4,000,000</li> <li>c Ketua Orang / Bulan 3,500,000</li> <li>d Wakil Ketua Orang / Bulan 3,000,000</li> <li>e Sekretaris Orang / Bulan 2,500,000</li> <li>f Wakil Sekretaris Orang / Bulan 2,000,000</li> <li>g Anggota Orang / Bulan 1,500,000</li> <li>h Staf Sekretariat Orang / Bulan 750,000</li> <li>i Pengolah Data Orang / Bulan 750,000</li> </ul>		
27	HONORARIUM TIM EVALUASI APB Desa/Pekon	<p>Honorarium Tim Evaluasi APB Desa/Pekon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua Orang / Kali 60,000</li> <li>b. Wakil Ketua Orang / Kali 40,000</li> <li>c. Sekretaris Orang / Kali 50,000</li> </ul>		

		e. Koordinator Sekretariat	Orang / Kali	40,000	
		f. Anggota Tim Evaluasi	Orang / Kali	35,000	
		g. Anggota Sekretariat	Orang / Kali	30,000	
28	HONORARIUM BAPERJAKAT	a. Pembina	Orang / Bulan	2,000,000	
		b. Ketua	Orang / Bulan	1,500,000	
		c. Sekretaris	Orang / Bulan	1,250,000	
		d. Anggota	Orang / Bulan	1,000,000	
		e. Koordinator Sekretariat	Orang / Bulan	750,000	
		f. Anggota Sekretariat	Orang / Bulan	500,000	
29	HONORARIUM TENAGA KONTRAK/ OPERATOR KOMPUTER e-KTP, SIAK DAN LK / DRIVER/ PROTOKOL Non PNS	1 Honorarium Tenaga Kontrak Non PNS	Orang / Bulan	700,000	
		2 Operator Komputer e-KTP, SIAK dan LK Non PNS	Orang / Bulan	600,000	
		3 Honorarium Driver Bupati/ Wakil bupati/ Sekda/ Pimpinan DPRD Non PNS	Orang / Bulan	1,500,000	
		4 Protokol Bupati Non PNS	Orang / Bulan	1,200,000	
30	HONORARIUM TENAGA PENDAMPING SOSIAL MASYARAKAT	HONORARIUM			
		1 TSKK	Orang / Bulan	300,000	
		2 PSM	Orang / Bulan	300,000	
		3 Tim Tagana	Orang / Bulan	300,000	
		4 Nakhoda Kapal	Orang / Bulan	300,000	
		Honorarium Sekretariat PKH			
		1 Koordinator Pendamping	Orang / Bulan	200,000	
		2 Pendamping PKH	Orang / Bulan	200,000	
		3 Operator Komputer	Orang / Bulan	200,000	
		Honorarium LKS Tripattit			
		1 Ketua	Orang / Bulan	250,000	
		2 Wakil Ketua	Orang / Bulan	200,000	
		3 Sekretaris	Orang / Bulan	175,000	
		4 Anggota	Orang / Bulan	150,000	
		Honorarium Dewan Pengupahan			
		1 Ketua	Orang / Bulan	250,000	
		2 Wakil Ketua	Orang / Bulan	225,000	
		3 Sekretaris	Orang / Bulan	175,000	
		4 Anggota	Orang / Bulan	150,000	
31	TAMBAHAN PENGHASRAN BERDASARKAN BEBAN KERJA	a. Sekretaris Daerah	Orang / Bulan	15,000,000	
		b. Eselon II-b			
		1 Asisten	Orang / Bulan	8,000,000	
		2 Staf Ahli	Orang / Bulan	8,000,000	
		3 Kepala SKPD	Orang / Bulan	7,000,000	
		c. Eselon III.a			
		1 Kepala Kantor	Orang / Bulan	3,000,000	
		2 Camat	Orang / Bulan	2,500,000	
		3 Kabag Setda	Orang / Bulan	2,500,000	
		4 Sekretaris/ Kabag Setwan/ Irban	Orang / Bulan	2,000,000	
		d. Eselon III.b			
		1 Kepala Bidang	Orang / Bulan	1,500,000	
		2 Sekretaris Kecamatan	Orang / Bulan	1,000,000	
		e. Eselon IV			
		1 Eselon IV SKPD	Orang / Bulan	500,000	
		2 Eselon IV Kecamatan	Orang / Bulan	350,000	
		3 Eselon IV Kelurahan/UPT Kesehatan/UPT Pendidikan	Orang / Bulan	250,000	
		f. Staf Pelaksana			
		- Golongan IV	Orang / Bulan	300,000	
		- Golongan III	Orang / Bulan	250,000	
		- Golongan II	Orang / Bulan	200,000	
		- Golongan I	Orang / Bulan	150,000	
		g. BAPPEDA			
		1 Kepala Badan	Orang / Bulan	11,000,000	
		2 Sekretaris	Orang / Bulan	5,250,000	
		3 Kepala Bidang	Orang / Bulan	2,500,000	
		4 Kasubbag/Kepala Seksi/Kasubbid	Orang / Bulan	1,350,000	
		5 Staf Pelaksana	Orang / Bulan	750,000	
		h. DIMAS PPKAD			
		1 Kepala Dinas	Orang / Bulan	15,000,000	
		2 Sekretaris Dinas	Orang / Bulan	8,600,000	
		3 Kepala Bidang	Orang / Bulan	7,500,000	
		4 Kasubbag/Kepala Seksi/Kasubbid	Orang / Bulan	3,000,000	
		5 Staf Pelaksana	Orang / Bulan	2,000,000	
		i. PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG SKPD			
		1. Sekretariat Daerah			
		- Kuasa Pengguna Anggaran	Orang / Bulan	3,000,000	
		- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)	Orang / Bulan	1,000,000	
		- Pembantu PPK	Orang / Bulan	350,000	
		- Bendahara Pengeluaran	Orang / Bulan	1,000,000	
		- Bendahara Pengeluaran Pembantu	Orang / Bulan	500,000	
		- Pembantu Pencatat Pembelian	Orang / Bulan	350,000	
		- Pembuat Dokumen	Orang / Bulan	350,000	
		- Pengelola Gaji	Orang / Bulan	400,000	
		- Pengurus Barang	Orang / Bulan	1,000,000	

	<p>2. SKPD Badan/Dinas/Inspektorat/Setwan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)</li> <li>- Pembantu PPK</li> <li>- Bendahara Pengeluaran</li> <li>- Bendahara Penerimaan</li> <li>- Bendahara Pengeluaran PPKD</li> <li>- Bendahara Penerimaan PPKD</li> <li>- Pembantu Pencatat Pembukuan</li> <li>- Pembuat Dokumen</li> <li>- Pengelola Gaji</li> <li>- Pengurus Barang</li> <li>- Pengelola Gaji UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> </ul> <p>3. SKPD Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)</li> <li>- Bendahara Pengeluaran</li> <li>- Bendahara Penerimaan</li> <li>- Pembantu Pencatat Pembukuan</li> <li>- Pembuat Dokumen</li> <li>- Pengelola Gaji</li> <li>- Pengurus Barang</li> </ul> <p>4. SKPD Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)</li> <li>- Pembantu PPK</li> <li>- Bendahara Pengeluaran</li> <li>- Pembantu Pencatat Pembukuan</li> <li>- Pembuat Dokumen</li> <li>- Pengurus Barang</li> </ul> <p>J. PROTOKOL, AJUDAN DAN DRIVER</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Protokol Bupati/Wakil Bupati</li> <li>2 Ajudan Bupati/Wakil Bupati</li> <li>3 Ajudan Istri Bupati/Wakil Bupati</li> <li>4 Driver Bupati/Wakil Bupati</li> <li>5 Driver Pimpinan DPRD</li> </ol>	<p>Orang / Bulan 500,000</p> <p>Orang / Bulan 300,000</p> <p>Orang / Bulan 750,000</p> <p>Orang / Bulan 300,000</p> <p>Orang / Bulan 1,000,000</p> <p>Orang / Bulan 1,000,000</p> <p>Orang / Bulan 300,000</p> <p>Orang / Bulan 300,000</p> <p>Orang / Bulan 300,000</p> <p>Orang / Bulan 750,000</p> <p>Orang / Bulan 250,000</p> <p>Orang / Bulan 500,000</p> <p>Orang / Bulan 500,000</p> <p>Orang / Bulan 300,000</p> <p>Orang / Bulan 300,000</p> <p>Orang / Bulan 300,000</p> <p>Orang / Bulan 300,000</p> <p>Orang / Bulan 500,000</p> <p>Orang / Bulan 300,000</p> <p>Orang / Bulan 200,000</p> <p>Orang / Bulan 300,000</p> <p>Orang / Bulan 200,000</p> <p>Orang / Bulan 200,000</p> <p>Orang / Bulan 200,000</p> <p>Orang / Bulan 300,000</p> <p>Orang / Bulan 1,000,000</p> <p>Orang / Bulan 1,000,000</p> <p>Orang / Bulan 1,000,000</p> <p>Orang / Bulan 1,000,000</p> <p>Orang / Bulan 1,000,000</p>	<p>500,000</p> <p>300,000</p> <p>750,000</p> <p>300,000</p> <p>1,000,000</p> <p>1,000,000</p> <p>300,000</p> <p>300,000</p> <p>300,000</p> <p>750,000</p> <p>250,000</p> <p>500,000</p> <p>500,000</p> <p>300,000</p> <p>300,000</p> <p>300,000</p> <p>500,000</p> <p>300,000</p> <p>200,000</p> <p>300,000</p> <p>200,000</p> <p>200,000</p> <p>200,000</p> <p>300,000</p> <p>1,000,000</p> <p>1,000,000</p> <p>1,000,000</p> <p>1,000,000</p> <p>1,000,000</p>		
30	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT KERJA	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS			
	<p>1 Kecamatan Pulau Pisang PNS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dokter Umum</li> <li>2 Paramedis</li> <li>3 Kecamatan</li> <li>4 Guru</li> <li>5 PPL</li> <li>6 PLKB</li> </ol> <p>2 Kecamatan Bengkunt Belimbing (Way Haru, Bandar Dalam, Siring Gading dan Way Tias) PNS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dokter Umum</li> <li>2 Paramedis</li> <li>3 Guru</li> <li>4 PPL</li> <li>5 PLKB</li> </ol>	<p>Orang / Bulan 2,500,000</p> <p>Orang / Bulan 500,000</p> <p>Orang / Bulan 500,000</p> <p>Orang / Bulan 500,000</p> <p>Orang / Bulan 500,000</p> <p>Orang / Bulan 500,000</p> <p>Orang / Bulan 5,000,000</p> <p>Orang / Bulan 1,000,000</p> <p>Orang / Bulan 1,000,000</p> <p>Orang / Bulan 1,000,000</p> <p>Orang / Bulan 1,000,000</p> <p>Orang / Bulan 1,000,000</p>	<p>2,500,000</p> <p>500,000</p> <p>500,000</p> <p>500,000</p> <p>500,000</p> <p>500,000</p> <p>5,000,000</p> <p>1,000,000</p> <p>1,000,000</p> <p>1,000,000</p> <p>1,000,000</p> <p>1,000,000</p>		
31	ADJUTAN BERDASARKAN TEMPAT KERJA (NON PNS)	<p>1 Kecamatan Pulau Pisang NON PNS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dokter Umum</li> <li>2 Paramedis</li> <li>3 Kecamatan</li> <li>4 Guru</li> <li>5 PPI</li> <li>6 PLKB</li> </ol> <p>2 Kecamatan Bengkunt Belimbing (Way Haru, Bandar Dalam, Siring Gading dan Way Tias) NON PNS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dokter Umum</li> <li>2 Paramedis (PNS/Non PNS)</li> <li>3 Guru</li> <li>4 PPL</li> <li>5 PLKB</li> </ol>	<p>Orang / Bulan 2,000,000</p> <p>Orang / Bulan 350,000</p> <p>Orang / Bulan 350,000</p> <p>Orang / Bulan 350,000</p> <p>Orang / Bulan 350,000</p> <p>Orang / Bulan 350,000</p> <p>Orang / Bulan 350,000</p> <p>Orang / Bulan 4,000,000</p> <p>Orang / Bulan 750,000</p> <p>Orang / Bulan 750,000</p> <p>Orang / Bulan 750,000</p> <p>Orang / Bulan 750,000</p> <p>Orang / Bulan 750,000</p>	<p>2,000,000</p> <p>350,000</p> <p>350,000</p> <p>350,000</p> <p>350,000</p> <p>350,000</p> <p>350,000</p> <p>4,000,000</p> <p>750,000</p> <p>750,000</p> <p>750,000</p> <p>750,000</p> <p>750,000</p>	
34	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi			
	<p>1 Dokter Spesialis</p>	<p>Orang / Bulan 25,000,000</p>	<p>25,000,000</p>		

BUPATI KESIK BARAT,

AGUS ISTIQALAT

**KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
DAN ORGANISASI  
TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1			<b>URUSAN WAJIB</b>
1	01		<b>Pendidikan</b>
1	01	01	Dinas Pendidikan
1	01	02	Kantor Perpustakaan Daerah
1	01	03	Dst.....
1	02		<b>Kesehatan</b>
1	02	01	Dinas Kesehatan
1	02	02	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	03	Rumah Sakit Jiwa
1	02	04	Rumah Sakit paru-paru
1	02	05	Rumah Sakit Ketergantungan Obat
1	02	06	Dst.....
1	03		<b>Pekerjaan Umum</b>
1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	02	Dinas Bina Marga
1	03	03	Dinas Pengairan
1	03	04	Dinas Pergawasan Bangunan dan Tata Kota
1	03	05	Dinas Cipta Karya
1	03	06	Dst.....
1	04		<b>Perumahan</b>
1	04	01	Dinas Permukiman
1	04	02	Dinas Pemadam Kebakaran *)
1	04	03	Dinas Pemakaman *)
1	04	04	Dst.....
1	05		<b>Penataan Ruang</b>
1	05	01	Dinas Tata Ruang *)
1	05	02	Dst.....
1			<b>Perencanaan Pembangunan</b>
1	06	01	BAPPEDA
1	06	02	Dst... ..
1	07		<b>Perhubungan</b>
1	07	01	Dinas Perhubungan
1	07	02	Dst.....
1	08		<b>Lingkungan Hidup</b>
1	08	01	Dinas Lingkungan Hidup
1	08	02	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
1	08	03	Dinas Pertamanan
1	08	04	Dinas Kebersihan
1	08	05	Dst.....

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
<b>1</b>	<b>09</b>		<b>Pertanahan</b>
1	09	01	Badan Pertanahan Daerah
1	09	02	Dst.....
<b>1</b>	<b>10</b>		<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>
1	10	01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1	10	02	Dst.....
<b>1</b>	<b>11</b>		<b>Pemberdayaan Perempuan</b>
1	11	01	Dinas Pemberdayaan Perempuan
1	11	02	Dst.....
<b>1</b>	<b>12</b>		<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>
1	12	01	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah
1	12	02	Dst.....
<b>1</b>	<b>13</b>		<b>Sosial</b>
1	13	01	Dinas Sosial
1	13	02	Dst.....
<b>1</b>	<b>14</b>		<b>Tenaga Kerja</b>
1	14	01	Dinas Tenaga Kerja
1	14	02	Dst.....
<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>
1	15	01	Dinas Koperasi dan UKM
1	15	02	Dst.....
<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Penanaman Modal</b>
1	16	01	Badan Penanaman Modal Daerah
1	16	02	Dst.....
<b>1</b>	<b>17</b>		<b>Kebudayaan</b>
1	17	01	Dinas Kebudayaan
1	17	02	Permuseuman
1	17	03	Dst.....
<b>1</b>	<b>18</b>		<b>Pemuda dan Olah Raga</b>
1	18	01	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	18	02	Dst.....
<b>1</b>	<b>19</b>		<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>
1	19	01	Dinas Kesbang Linmas
1	19	02	Dinas Ketentraman dan Ketertiban
1	19	03	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	04	Dst.....
<b>1</b>	<b>20</b>		<b>Pemerintahan Umum</b>
1	20	01	DPRD
1	20	02	KDH & WKDH
1	20	03	Sekretariat Daerah
1	20	04	Sekretariat DPRD
1	20	05	Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1	20	06	Inspektorat

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	20	07	Kecamatan Pesisir Selatan
1	20	08	Kecamatan Pesisir Tengah
1	20	09	Kecamatan Pesisir Utara
1	20	10	Kecamatan Lemong
1	20	11	Kecamatan Karya Penggawa
1	20	12	Kecamatan Bengkunt
1	20	13	Kecamatan Ngambur
1	20	14	Kecamatan Bengkunt Belimbing
1	20	15	Kecamatan Way Krui
1	20	16	Kecamatan Krui Selatan
1	20	17	Kecamatan Pulau Pisang
1	20	18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	20	19	Badan Kepegawaian Daerah
1	21		<b>Ketahanan Pangan</b>
1	21	01	Badan Pendidikan dan Pelatihan
1	21	02	Badan Kepegawaian Daerah
1	21	03	Dst.....
1	22		<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
1	22	01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1	22	02	Dst.....
1	23		<b>Statistik</b>
1	23	01	Badan Statistik daerah
1	23	02	Kantor Statistik Daerah
1	23	03	Dst.....
1	24		<b>Kearsipan</b>
1	24	01	Kantor Arsip Daerah
1	24	02	Dst.....
1	25		<b>Komunikasi dan Informatika</b>
1	25	01	Dinas Informasi dan Komunikasi
1	25	02	Kantor Pengolahan Data Elektronik
1	25	03	Dst.....
2			<b>URUSAN PILIHAN</b>
2	01		<b>Pertanian</b>
2	01	01	Dinas Pertanian
2	01	02	Dinas Perkebunan
2	01	03	Dinas Peternakan
2	01	04	Dinas Ketahanan Pangan
2	01	05	Dst.....
2	02		<b>Kehutanan</b>
2	02	01	Dinas Kehutanan
2	02	02	Dst.....
2	03		<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>
2	03	01	Dinas Pertambangan
2	03	02	Dst.....

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2	04		<b>Pariwisata</b>
2	04	01	Dinas Pariwisata
2	04	02	Kebun Binatang
2	04	03	Dst.....
2	05		<b>Kelautan dan Perikanan</b>
2	05	01	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	05	02	Dst.....
2	06		<b>Perdagangan</b>
2	06	01	Dinas Perdagangan
2	06	02	Dinas Pasar
2	06	03	Dst.....
2	07		<b>Perindustrian</b>
2	07	01	Dinas Dinas Perindustrian
2	07	02	Dst.....
2	08		<b>Transmigrasi</b>
2	08	01	Dinas Transmigrasi
2	08	02	Dst.....

**BUPATI ~~PESISIR~~ BARAT,**

**~~AGUS~~ ISTIQLAL**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
SUSUNAN REKENING PENDAPATAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

Kode	Uraian
4.	PENDAPATAN DAERAH
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah
4.1.1.01.	Pajak Hotel
4.1.1.01.01.	Hotel Bintang Lima Bertan
4.1.1.01.02.	Hotel Bintang Lima
4.1.1.01.03.	Hotel Bintang Empat
4.1.1.01.04.	Hotel Bintang Tiga
4.1.1.01.05.	Hotel Bintang Dua
4.1.1.01.06.	Hotel Bintang Satu
4.1.1.01.07.	Hotel Metal Tiga
4.1.1.01.07.	Warung Bakso/Bakmi
4.1.1.01.08.	Hotel Metal Dua
4.1.1.01.09.	Hotel Metal Satu
4.1.1.01.10.	Motel
4.1.1.01.11.	Cottage
4.1.1.01.12.	Loaman/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
4.1.1.01.13.	Wisma Perwisata
4.1.1.01.14.	Dsl.....
4.1.1.02.	Pajak Restoran
4.1.1.02.01.	Restoran
4.1.1.02.02.	Rumah Makan
4.1.1.02.03.	Cafe
4.1.1.02.04.	Kantin
4.1.1.02.05.	Katering
4.1.1.02.06.	Warung Makan
4.1.1.02.07.	Warung Bakso/Bakmi
4.1.1.03.	Pajak Hiburan
4.1.1.03.01.	Tontonan Film/Bioskop
4.1.1.03.02.	Pegelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4.1.1.03.03.	Kontes Kecantikan
4.1.1.03.04.	Kontes Binaraga
4.1.1.03.05.	Pameran
4.1.1.03.06.	Diskotik
4.1.1.03.07.	Karaoke
4.1.1.03.08.	Klub Malam
4.1.1.03.09.	Sirkus/Akrobat/Sulap
4.1.1.03.10.	Permainan Biliar
4.1.1.03.11.	Permainan Golf
4.1.1.03.12.	Permainan Bowling
4.1.1.03.13.	Pacuan Kuda
4.1.1.03.14.	Balap Kendaraan Bermotor
4.1.1.03.15.	Permainan Katangkas
4.1.1.03.16.	Panti Pijat/Refleksi
4.1.1.03.17.	Mandi Uap/Spa
4.1.1.03.18.	Pusat Kebugaran
4.1.1.03.19.	Perandingan Olahraga
4.1.1.03.20.	Pajak Pertunjukan/Show
4.1.1.04.	Pajak Reklame
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Billboard/Videootron/Kegatron
4.1.1.04.02.	Reklame Kain
4.1.1.04.03.	Reklame Meleka/Glitter

04	Reklame Selebrasi
05	Reklame Berjalan
06	Reklame Udara
07	Reklame Apung
08	Reklame Suara
09	Reklame Film/Slide
10	Reklame Peregangan
11	Reklame Poster
	Pajak Penerangan Jalan
01	Pajak Penerangan Jalan PLN
02	Pajak Penerangan Jalan non PLN
	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
	Asbes
02.	Batu Tulis
03	Batu setengah permata
04.	Batu Kapur
05	Batu Apung
05	Pasir
07.	Batu
08.	Tanah
	Pajak Parkir
01.	Pajak Parkir
02.	Dat.....
1.	Pajak Air Bawah Tanah
01	Pajak Air Bawah Tanah
02.	Dat.....
03.	Pajak Air Tanah
3.	Pajak Sarang Burung Walet
01.	Pajak Sarang Burung Walet
02.	Dat.....
0.	Pajak Lingkungan
001.	Pajak Lingkungan
002.	Dat.....
11.	Tunggakan Pajak
11.01.	Tunggakan Pajak
12.	Pajak BPHTB
12.01.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
	Hasil Retribusi Daerah
01.	Retribusi Jasa Umum
01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan
01.02.	Retribusi Pelayanan Pembersihan/Kebersihan
01.03.	Retribusi Akta Catatan Sipil
01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Masyarakat
01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar
01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
01.08.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
01.09.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
01.10.	Retribusi Pelayanan Pendidikan
01.11.	Retribusi Penyerahan Dokumen Lelang
01.12.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
02.	Retribusi Jasa Usaha
02.01.	Retribusi Pemakaman Kekayaan Daerah
02.02.	Retribusi Pasar Grosir / Perokoan
02.03.	Retribusi Tempat Pelelangan
02.04.	Retribusi Terminal
02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir
02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

1.2.02.07.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1.2.02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan
1.2.02.09.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
1.2.02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1.2.02.11.	Retribusi Penyeberangan di Air
1.2.02.12.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1.2.02.13.	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah
1.2.02.14.	Retribusi Uang Legas
1.2.02.	Retribusi Perizinan Tertentu
1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1.2.03.02.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan
1.2.03.04.	Retribusi Izin Trayek
1.2.03.05.	Retribusi Izin Usaha Perikanan
1.2.03.06.	Retribusi Izin Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas
1.2.03.07.	Retribusi Izin Bidang Industri
1.2.03.08.	Retribusi Pemungutan Kayu dan Bukan Kayu dan Tanah Milik atau Mutan Lainnya
1.2.03.09.	Retribusi Pengusahaan Sarang Burung Walet
1.2.03.10.	Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
1.2.03.11.	Surat Izin Usaha Perdagangan
1.2.03.12.	Retribusi Izin Gergaji Rentel
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
1.3.01.01.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
1.3.01.02.	BUMD .....
1.3.01.03.	Bagian Laba PT, Bank Lampung
1.3.02.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
1.3.02.01.	BUMN .....
1.3.02.02.	Dst.....
1.3.03.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
1.3.03.01.	Perusahaan .....
1.3.03.02.	Dst.....
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
4.1.4.01.01.	Pelepasan Hak Atas Tanah
4.1.4.01.02.	Penjualan Peralatan/Pelengkapan Kantor tidak terpakai
4.1.4.01.03.	Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai
4.1.4.01.04.	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4.1.4.01.05.	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua
4.1.4.01.06.	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
4.1.4.01.07.	Penjualan Drum Bekas
4.1.4.01.08.	Penjualan Hasil Penehangan Pohon
4.1.4.01.09.	Penjualan Lampu Hias Bekas
4.1.4.01.10.	Pendapatan dari Balek Benih Ikan
4.1.4.01.11.	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
4.1.4.01.12.	Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi
4.1.4.01.13.	Penjualan hasil pertanian
4.1.4.01.14.	Penjualan hasil kehutanan
4.1.4.01.15.	Penjualan hasil perkebunan
4.1.4.01.16.	Penjualan hasil peternakan
4.1.4.01.17.	Penjualan hasil perikanan
4.1.4.01.18.	Penjualan hasil sikaan
4.1.4.01.19.	Penjualan Hasil Pengelolaan Sampah
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
	Pendapatan dari BLUD RSUD Liwa
	Penerimaan Jasa Giro
	Jasa Giro Kas Daerah
	Jasa Giro Pemegang Kas

4.1.4.02.03.	Jasa Giro Dana Cadangan
4.1.4.02.04	Dst.....
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga deposito
4.1.4.03.01.	Rekening Deposito pada Bank
4.1.4.03.02.	Dst.....
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
4.1.4.04.01.	Kerugian Uang
4.1.4.04.02.	Kerugian Barang
4.1.4.04.03.	Dst.....
4.1.4.05.	Komis, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4.1.4.05.01.	Penerimaan Komisi dari penempatan Kas Daerah
4.1.4.05.02.	Penerimaan Potongan dari ....
4.1.4.05.03.	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari .....
4.1.4.05.04.	Dst.....
4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.06.01.	Bidang Pendidikan
4.1.4.06.02.	Bidang Kesehatan
4.1.4.06.03.	Bidang Pekerjaan Umum
4.1.4.06.04.	Bidang Perumahan Rakyat
4.1.4.06.05.	Bidang Penataan Ruang
4.1.4.06.06.	Bidang Perencanaan Pembangunan
4.1.4.06.07.	Bidang Perhubungan
4.1.4.06.08.	Bidang Lingkungan Hidup
4.1.4.06.09.	Bidang Pertanahan
4.1.4.06.10.	Dst.....
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak
4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Restoran
4.1.4.07.03.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4.1.4.07.04.	Pendapatan Denda Pajak Reklame
4.1.4.07.05.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4.1.4.07.06.	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
4.1.4.07.07.	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4.1.4.07.08.	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah
4.1.4.07.09.	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4.1.4.07.10.	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan
4.1.4.07.11.	Dst.....
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi
4.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4.1.4.08.02.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4.1.4.08.03.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu
4.1.4.08.04.	Dst.....
4.1.4.09.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4.1.4.09.01.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.09.02.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4.1.4.09.03.	Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musliman
4.1.4.09.04.	Dst.....
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian
4.1.4.10.01.	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4.1.4.10.02.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan
4.1.4.10.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan
4.1.4.10.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas
4.1.4.10.05.	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka
4.1.4.10.06.	Pendapatan dari Pengembalian LKM, Koperasi dan UKM
4.1.4.10.10.	Pendapatan dari Pengembalian Lain Lain
4.1.4.11.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
4.1.4.11.01.	Fasilitas Sosial
4.1.4.11.02.	Fasilitas Umum

4.1.4.11.03.	Dst.....
4.1.4.12.	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4.1.4.12.01.	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk
4.1.4.12.02.	Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan
4.1.4.12.03.	Uang Ujian kenaikan tingkat/kelas
4.1.4.12.04.	Dst.....
4.1.4.13.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rumah
4.1.4.13.01.	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah
4.1.4.13.02.	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan
4.1.4.13.03.	Dst.....
4.1.4.14.	Sumbangan Pihak Ketiga
4.1.4.14.01.	Sumbangan Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
4.1.4.14.02.	Dst
4.1.4.15.	Penggunaan Mobil Tiga
4.1.4.15.01.	Penggunaan Mobil Tiga
4.1.4.16.	Tak Terduga
4.1.4.17.	Pengembalian UUDP
4.1.4.17.01.	Pengembalian UUDP
4.1.4.18.	Rekening Listrik Pasar
4.1.4.18.01.	Rekening Listrik Pasar
4.1.4.19.	Sewa Mesin Listrik
4.1.4.19.01.	Sewa Mesin Listrik
4.1.4.20.	Penggunaan Mobil Jenazah
4.1.4.20.01.	Penggunaan Mobil Jenazah
4.1.4.21.	Sewa Hotel
4.1.4.21.01.	Sewa Hotel Novotel
4.2.	Dana Pertimbangan
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak
4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4.2.1.01.02.	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh
4.2.1.01.04.	Pengembalian PBB Bagian pemerintah Pusat
4.2.1.01.05.	Pengembalian BPHTB Bagian Pemerintah Pusat
4.2.1.01.06.	Penerimaan Gaya Pemungutan PBB (BP-PBB)
4.2.1.01.07.	Insentif PBB
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4.2.1.02.01.	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4.2.1.02.03.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4.2.1.02.04.	Bagi Hasil dari Iuran Tanah (Land-rent)
4.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4.2.1.02.06.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4.2.1.02.11.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4.2.1.02.12.	Bagi Hasil dari penerimaan cukai tembakau
4.2.2.	Dana Alokasi Umum
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus
4.2.3.01.	Dana alokasi khusus
4.2.3.01.01.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan
4.2.3.01.02.	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
4.2.3.01.03.	DAK Bidang Infrastruktur Air Bersih
4.2.3.01.04.	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi

FD

4.2.3.01.05	DAK Bidang Kesehatan Dasar
4.2.3.01.06	DAK Bidang Kesehatan Rujukan
4.2.3.01.07	DAK Bidang Pendidikan
4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian
4.2.3.01.10	DAK Bidang Lingkungan Hidup
4.2.3.01.11	DAK Bidang Keluarga Berencana
4.2.3.01.12	DAK Bidang Kehulanan
4.2.3.01.13	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan
4.2.3.01.14	DAK Bidang Perdagangan
4.2.3.01.15	DAK Bidang Keselamatan Transportasi
4.2.3.01.16	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman
4.2.3.01.17	DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
4.3.1.	Pendapatan Hibah
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4.3.1.01.01.	Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.1.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya
4.3.1.02.01	Pemerintah Daerah
4.3.1.02.02.	Dst.....
4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri
4.3.1.03.01	Badan/lembaga/organisasi swasta .....
4.3.1.03.02.	Dst.....
4.3.1.04.	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan
4.3.1.04.01.	Kelempok masyarakat/perorangan .....
4.3.1.04.02	Dst.....
4.3.1.05.	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
4.3.1.05.01.	Pendapatan Hibah dan Bilateral .....
4.3.1.05.02.	Pendapatan Hibah dari Multilateral
4.3.1.05.03.	Pendapatan Hibah dari Donor lainnya
4.3.1.05.04	Dst.....
4.3.2.	Dana Darurat
4.3.2.01.	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.3.2.01.01.	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.3.2.01.02.	Dst.....
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.02.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Dilas Air
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.04.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Djelas Air
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.06.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
4.3.3.01.08	Dst..
4.3.3.02.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Daerah / Provinsi Lainnya
4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi .....
4.3.3.02.02.	Bagi Hasil dari Penerimaan Cukai Tembakau
4.3.3.03.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten (J)
4.3.3.03.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten .....
4.3.3.03.02.	Dst.....
4.3.3.04.	Dana Bagi Hasil Pajak dari kota (J)
4.3.3.04.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari kota .....
4.3.3.04.02.	Dst.....
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian
4.3.4.01.01	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan
4.3.4.01.02	Dana Pungutan Infrastruktur Dan Prasarana Daerah

- 4.3.4.02. Dana Tunjangan Guru
- 4.3.4.02.01 Dana Tunjangan Guru PNSD
- 4.3.4.02.02 Dst.....
- 4.3.4.03. Dana Bantuan Operasional Sekolah
- 4.3.4.03.01 Dana BOS
- 4.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- 4.3.5.01. Bantuan keuangan dari provinsi
- 4.3.5.01.01 Bantuan keuangan dari Provinsi
- 4.3.5.01.02 Dst.....
- 4.3.5.01.03 Bantuan dari Pemerintah Pusat
- 4.3.5.02. Bantuan keuangan dari kabupaten
- 4.3.5.02.01 Bantuan keuangan dari Kabupaten
- 4.3.5.02.02 Dst.....
- 4.3.5.03. Bantuan keuangan dari kota
- 4.3.5.03.01 Bantuan keuangan dari Kota
- 4.3.5.03.02 Dst.....

KODE REKENING BELANJA DAERAH

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.	BELANJA DAERAH
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan
5.1.1.01.10.	Uang Pukul
5.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah
5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi
5.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran
5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan
5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan
5.1.1.01.17.	Uang Duka Wafat/Tawes
5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian
5.1.1.01.19.	Tunjangan Badan Legislatif
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan promosi
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
5.1.1.02.08.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Perubahan Objek/
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDHAKKDH
5.1.1.03.01.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5.1.1.03.02.	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD
5.1.1.03.03.	Belanja Penunjang Operasional KDHAKKDH
5.1.1.04.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.04.01.	Biaya Pemungutan PBB
5.1.1.04.02.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.05.01.	Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.1.06.01.	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.2.	BELANJA LANGSUNG
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01.	Honorarium PNS
5.2.1.01.01.	Honorarium Penilai Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Penerima Barang dan Jasa
5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Juri dan Pembina
5.2.1.01.05.	Honorarium Pelugas Lapangan
5.2.1.01.06.	Honorarium Baperfaksi
5.2.1.01.07.	Honorarium Bapak
5.2.1.01.08.	Honorarium Pengelola Obat, Alkes dan Laboratorium
5.2.1.01.09.	Honorarium Peserta Diklat
5.2.1.01.10.	Honorarium Pegawai Tenaga Teknis
5.2.1.01.11.	Honorarium Tim Penyusun Dokumen
5.2.1.01.12.	Honorarium Tim Koordinasi
5.2.1.01.13.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
5.2.1.02.02.	Honorarium Peserta
5.2.1.02.03.	Hadiah Dana/ Uang Pembinaan/Uang-Tali Asih
5.2.1.02.04.	Honorarium Tenaga Medis
5.2.1.02.05.	Honorarium Teknisi ICT
5.2.1.02.06.	Honorarium/Upah Tukang
5.2.1.02.07.	Honorarium Tenaga Survey
5.2.1.02.08.	Honorarium/Upah Tenaga Tidak Terampil
5.2.1.03.	Uang Lembur
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS
5.2.1.04.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5.2.1.04.01.	Belanja Beasiswa tugas belajar G1
5.2.1.04.02.	Belanja Beasiswa tugas belajar S1
5.2.1.04.03.	Belanja Beasiswa tugas belajar S2
5.2.1.04.04.	Belanja Beasiswa tugas belajar S3
5.2.1.04.05.	Belanja Beasiswa tugas belajar STPDN
5.2.1.05.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
5.2.1.05.01.	Belanja kursus-kursus tingkat pelatihan
5.2.1.05.02.	Belanja sosialisasi
5.2.1.05.03.	Belanja bimbingan teknis
5.2.1.05.04.	Belanja Iuran Adkasi
5.2.1.05.05.	Uraja dan Penyelenggaraan Patroli
5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD
5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai BLUD
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habl
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.02.	Belanja dokumentasi administrasi tender
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik / tempu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian labung pemadam kebakaran
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian labung gas

5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi
5.2.2.01.10	Belanja Bahan Kadoleron Hewan
5.2.2.01.11	Belanja Bahan Peluru
5.2.2.01.12	Belanja Bahan Perlengkapan Paku Habis
5.2.2.01.13	Belanja Bahan Perlengkapan Gudang
5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Pengibar Bendera dan Penan MTD
5.2.2.01.15	Belanja Alat Olah Raga
5.2.2.01.16	Belanja Alat Keasrian
5.2.2.01.17	Belanja Alat alat Pramuka
5.2.2.01.18	Belanja Peralatan Pertanian
5.2.2.01.19	Belanja Alat Ibadat
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibil tanaman
5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia
5.2.2.02.06	Belanja Bahan / Materi Pelatihan
5.2.2.02.07	Belanja Teropong
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pengobatan
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Pameran
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Elektronik / Mesin
5.2.2.02.11	Belanja Bahan Display/Dekorasi
5.2.2.02.12	Belanja Bahan Peralatan Kesehatan
5.2.2.02.13	Belanja Bahan Paraga
5.2.2.02.14	Belanja Bahan Peralatan Kesehatan
5.2.2.02.15	Belanja Bahan/Material Pertanian
5.2.2.02.16	Belanja Bahan Materi / Pelatihan
5.2.2.02.17	Belanja Bahan /Material Pertanian/Pertahanan
5.2.2.02.18	Belanja Bahan/Alat Sample
5.2.2.02.19	Belanja Bahan Makanan
5.2.2.02.20	Belanja Bahan/Material Alat Pengolahan
5.2.2.02.21	Belanja Bahan Perlengkapan Lomba
5.2.2.02.22	Belanja Bahan Perlengkapan Rumah Tangga
5.2.2.02.23	Belanja Bahan Hadiah/kado/bingkisan
5.2.2.02.24	Belanja Sarana Budidaya Ikan
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01	Belanja telepon
5.2.2.03.02	Belanja air
5.2.2.03.03	Belanja listrik
5.2.2.03.04	Belanja Jasa pengumuman lantang/ pemungut telang
5.2.2.03.05	Belanja surti kabar/majalah
5.2.2.03.06	Belanja kawat/kawatmili/internet
5.2.2.03.07	Belanja paksi/pengiriman
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.2.2.03.10	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5.2.2.03.11	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Media Elektronik
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pameran/Specimen
5.2.2.03.15	Belanja Publikasi

5.2.2.03.18.	Belanja Dana Pembinaan Koperasi
5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Perawatan dan Pengobatan
5.2.2.03.18.	Belanja Registrasi Senjata
5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pengamanan
5.2.2.03.20.	Belanja Operasional Sekolah
5.2.2.03.21	Belanja Jasa Penguatan Modul
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Uji Laboratorium
5.2.2.03.23	Belanja Operasional Protokol
5.2.2.03.24.	Belanja Tamu
5.2.2.03.25.	Belanja pemeliharaan kesehatan
5.2.2.03.26	Uji Sampel
5.2.2.03.27.	Belanja langganan domain
5.2.2.03.28.	Belanja Operasional Puskesmas
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Perawatan Pasien Diluar Tanggungan ASKES, Jamkesmas dan Jamkesda
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Reimbusi Sampah
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5.2.2.04.03	Belanja Pemeliharaan Kesehatan
5.2.2.04.04	Belanja Premi Asuransi Jiwa
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Kebakaran
5.2.2.04.06	Belanja Premi Asuransi Lainnya
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Baku, Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.	Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.06.	Belanja Harpar/jangan Sural Ijin Mengemudi
5.2.2.05.07.	Belanja Ban dan Accu
5.2.2.05.08.	Belanja Registrasi Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.09.	Belanja operasional kendaraan dinas
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.	Belanja cetak
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.	Belanja Penjualan (+ Cover)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/umah dinas
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung kantor/tempat
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/ruang lambat/hanggar sarana mobilitas
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Kebun / Pertengkapan Taman
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Hotel/Menginapan
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.08.03.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
5.2.2.08.04.	Dst. ....
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat
5.2.2.09.01.	Belanja sewa Estimator

5.2.2.09.02.	Belanja sewa Buldoser
5.2.2.09.03.	Belanja Sewa Alat Balon Gas K3
5.2.2.09.04.	Sewa Alat - Alat Berat
5.2.2.10.	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peristalan Kantor
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.02.	Belanja sewa komputer dan printer
5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakalan adat/tradisional
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Seludris
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Meja Gambar
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Elektronik
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Alat Dekorasi
5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Alat Laboratorium
5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Ukur
5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.14.	Belanja sewa perengkapan dan peralatan lainnya
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Hewan Pegawai
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu
5.2.2.11.04.	Belanja Makan dan Minum Insiden/Il
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Rumah Tangga
5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta
5.2.2.11.07.	Belanja Makan dan Minum Hewan
5.2.2.12.	Belanja Pakelan Dinas dan Atributnya
5.2.2.12.01.	Belanja Pakelan Dinas KDH dan WKDH
5.2.2.12.02.	Belanja Pakelan Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.03.	Belanja Pakelan Sipil Lengkap (PSL)
5.2.2.12.04.	Belanja Pakelan Dinas Harian (PDH)
5.2.2.12.05.	Belanja Pakelan Dinas Upacara (PDU)
5.2.2.12.06.	Belanja Pakelan Dinas Lapangan (POL)
5.2.2.12.07.	Belanja Pakelan Sipil Resmi (PSR)
5.2.2.12.08.	Belanja Atribut
5.2.2.13.	Belanja Pakelan Kerja
5.2.2.13.01.	Belanja pakelan kerja lapangan
5.2.2.13.02.	Belanja Pakelan Dinas Peserta Kelembagaannya
5.2.2.14.	Belanja Pakelan khusus dan hard-hard tertentu
5.2.2.14.01.	Belanja pakelan KORPRI
5.2.2.14.02.	Belanja pakelan adat daerah
5.2.2.14.03.	Belanja pakelan batik tradisional
5.2.2.14.04.	Belanja pakelan oahraga
5.2.2.14.05.	Belanja pakelan paskibra
5.2.2.14.06.	Belanja pakelan Slat
5.2.2.14.07.	Belanja Pakelan Peserta
5.2.2.14.08.	Belanja Pakelan Muslim
	Belanja Perjalanan Dinas
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
	Belanja perjalanan dinas luar daerah
	Belanja Transportasi Peserta

5.2.2.15.04	Belanja perjalanan dinas luar negeri
5.2.2.15.05	Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5.2.2.16.01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
5.2.2.17	Belanja Kurus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.01	Belanja Kurus-Kurus Singkat / Pelatihan
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi
5.2.2.17.03	Dst.....
5.2.2.17.04	Dst.....
5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5.2.2.18.01	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Negeri
5.2.2.18.02	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Negeri
5.2.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Arsip Inaktif
5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung
5.2.2.18.09	Belanja Pemeliharaan Jalan
5.2.2.18.10	Belanja Pemeliharaan Jambatan
5.2.2.18.11	Belanja Pemeliharaan Ornamen
5.2.2.18.12	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah
5.2.2.18.13	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik
5.2.2.18.14	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
5.2.2.18.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum
5.2.2.18.16	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5.2.2.18.17	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
5.2.2.18.18	Belanja Pemeliharaan Sumur Bor
5.2.2.18.19	Belanja Pelayanan Kesehatan Masyarakat
5.2.2.18.20	Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan
5.2.2.18.21	Belanja Pemeliharaan Alat Bensi
5.2.2.18.22	Belanja Pemeliharaan Mesin
5.2.2.18.23	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan
5.2.2.18.24	Belanja Pelaksanaan Tala Bata
5.2.2.19	Belanja Pemulangan Pegawai
5.2.2.19.01	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pansun Dalam Daerah
5.2.2.19.02	Belanja Pemulangan Pegawai Pansun Luar Daerah
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Taman
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Pertangkapan Kantor
5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Jangjian litigasi
5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bengkai
5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pertanian
5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga
5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium
5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Penggunaan Sejarah

5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Rumah Sakit
5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Meubelair
5.2.2.20.20	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Perengkapan Rumah Jabatan
5.2.2.20.22.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Jabatan
5.2.2.20.23	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Sakit
5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Internet / Website
5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Bangunan Tradisional
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi/Jasa Pihak Ketiga
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi pengawasan
5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
5.2.2.21.05	Belanja Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa cleaning service
5.2.2.21.07.	Belanja Jasa Hiburan
5.2.2.21.10.	Belanja Jasa Konsultansi Software
5.2.2.21.11.	Belanja Jasa Konsultansi Pendampingan
5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Biaya Operasional Bekeloh (BOB)
5.2.2.22.01	Belanja Barang dan Jasa BOS SD/SLB
5.2.2.22.02	Belanja Barang dan Jasa BOS SMP/SMP LB/SMPT/SATAP
5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga
5.2.2.23.01.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
5.2.2.23.02.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
5.2.2.23.05.	Belanja Jasa Pendamping Program PPIP
5.2.2.25.	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.25.01.	Belanja barang yang akan dijual kepada masyarakat
5.2.2.25.02.	Belanja Barang yang akan dijual kepada pihak ketiga
5.2.2.26.	Belanja Barang dan Jasa BLUD
5.2.2.26.01.	Belanja barang dan Jasa BLUD
5.2.2.27.	Belanja Jasa Perijinan
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Perijinan BPRS
5.2.2.28.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.2.28.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.2.29.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /Masyarakat
5.2.2.29.01.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
5.2.2.29.02.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan tanah kantor
5.2.3.01.02.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit
5.2.3.01.03	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas
5.2.3.01.04.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik
5.2.3.01.05	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak
5.2.3.01.06.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar
5.2.3.01.07	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan
5.2.3.01.08.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan
5.2.3.01.09.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus
5.2.3.01.10.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus
5.2.3.01.11.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panli asuhan
5.2.3.01.12.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panli jompo

5.2.3.01.13.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum terminal
5.2.3.01.14	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum bandara
5.2.3.01.15	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis
5.2.3.01.16	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan
5.2.3.01.17	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan
5.2.3.01.18.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pasar
5.2.3.01.19.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah
5.2.3.01.20	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman
5.2.3.01.21	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat
5.2.3.01.22	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum ibadah
5.2.3.01.23	Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga
5.2.3.01.24	Belanja modal Pengadaan tanah perumahan
5.2.3.01.25	Belanja modal Pengadaan tanah pertanian
5.2.3.01.26	Belanja modal Pengadaan tanah perkebunan
5.2.3.01.27	Belanja modal Pengadaan tanah perikanan
5.2.3.01.28	Belanja modal Pengadaan tanah peternakan
5.2.3.01.29	Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan
5.2.3.01.30	Belanja modal Pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku
5.2.3.01.31	Belanja Modal Pengadaan Tunjangan Ornamen
5.2.3.01.32	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum jalan
5.2.3.01.33	Belanja modal Pengadaan tanah perumahan/wisma/gedung/outlet
5.2.3.01.34	Belanja modal Pengadaan tanah pemakaman
5.2.3.01.35	Belanja modal Pengadaan tanah pusat perdagangan
5.2.3.01.36	Belanja modal Pengadaan tanah untuk kawasan industri
5.2.3.01.37.	Belanja modal Pengadaan tanah asrama
5.2.3.01.38.	Belanja modal Pengadaan tanah untuk sarana umum lainnya
5.2.3.01.39.	Belanja Modal Pengadaan/rehabilitasi/pemagaran hutan kota
5.2.3.01.40	Belanja modal Pengadaan tanah waduk/bendungan/bozem
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5.2.3.02.01.	Belanja modal Pengadaan traktor
5.2.3.02.02.	Belanja modal Pengadaan bulldozer
5.2.3.02.03.	Belanja modal Pengadaan steam wala
5.2.3.02.04.	Belanja modal Pengadaan ekskavator
5.2.3.02.05	Belanja modal Pengadaan dump truk
5.2.3.02.06	Belanja modal Pengadaan crane
5.2.3.02.07.	Belanja modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan
5.2.3.02.08.	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah semen
5.2.3.02.09.	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)
5.2.3.02.10.	Belanja Modal Pengadaan Shine Jaw
5.2.3.02.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Palang Rumput
5.2.3.02.12.	Belanja Modal Pengadaan Dongkrak Hidrolik
5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Sampah
5.2.3.02.14	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemecah Plastik
5.2.3.02.15	Belanja modal Pengadaan mesin genset
5.2.3.02.16.	Belanja modal Pengadaan mesin pompa air
5.2.3.02.17.	Belanja Modal pengadaan Incenerator
5.2.3.02.18	Belanja Modal Pengadaan Mobil Daur Ulang Aspal
5.2.3.02.19.	Belanja Modal Pengadaan Loader
5.2.3.02.20.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
5.2.3.03.02	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
5.2.3.03.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor

5.2.3.03.04.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus
5.2.3.03.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
5.2.3.03.06	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
5.2.3.03.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor langkis (air, minyak, UN3)
5.2.3.03.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor beks
5.2.3.03.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
5.2.3.03.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
5.2.3.03.11.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran
5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
5.2.3.03.13	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elektor
5.2.3.03.14.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan
5.2.3.03.15.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor kompektor
5.2.3.03.16.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.2.3.04.01	Belanja modal Pengadaan gerobak
5.2.3.04.02.	Belanja modal Pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/didomo/andong
5.2.3.04.03.	Belanja modal Pengadaan becak
5.2.3.04.04	Belanja modal Pengadaan sepeda
5.2.3.04.05.	Belanja modal Pengadaan karavan
5.2.3.04.06	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan lampah
5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor
5.2.3.05.01	Belanja modal Pengadaan kapal motor
5.2.3.05.02	Belanja modal Pengadaan kapal ten
5.2.3.05.03	Belanja modal Pengadaan speed boat
5.2.3.05.04.	Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempai
5.2.3.05.05.	Belanja modal Pengadaan hydro foil
5.2.3.05.06.	Belanja modal Pengadaan jet foil
5.2.3.05.07.	Belanja modal Pengadaan kapal tug boat
5.2.3.05.08.	Belanja modal Pengadaan kapal tanker
5.2.3.05.09	Belanja modal Pengadaan kapal kargo
5.2.3.05.10.	Pengadaan Jet Sky
5.2.3.06.11.	Dst.....
5.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor
5.2.3.06.01.	Belanja modal Pengadaan perahu layar
5.2.3.06.02.	Belanja modal Pengadaan perahu sampan
5.2.3.06.03.	Belanja modal Pengadaan perahu longkeng
5.2.3.06.04.	Belanja modal Pengadaan perahu karet
5.2.3.06.05.	Belanja modal Pengadaan perahu rakit
5.2.3.06.06.	Belanja modal Pengadaan perahu seloet
5.2.3.06.07	Belanja Modal Bidang Perikanan
5.2.3.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara
5.2.3.07.01.	Belanja modal Pengadaan pesawat kargo
5.2.3.07.02.	Belanja modal Pengadaan pesawat penumpang
5.2.3.07.03.	Belanja modal Pengadaan pesawat helikopter
5.2.3.07.04.	Belanja modal pesawat pemadam kebakaran
5.2.3.07.05.	Belanja modal Pengadaan pesawat capung
5.2.3.07.06.	Belanja modal Pengadaan pesawat terbang amphi
5.2.3.07.07	Belanja modal Pengadaan pesawat terbang layang
5.2.3.07.08.	Dst.....
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5.2.3.08.01.	Belanja modal Pengadaan mesin las
5.2.3.08.02.	Belanja modal Pengadaan mesin bubut

5.2.3.08.03.	Belanja modal Pengadaan mesin dongkrak
5.2.3.08.04	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor
5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Masker
5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Kampak
5.2.3.08.07	Belanja Modal Pengadaan Dungktrak Siaga
5.2.3.08.08	Belanja Modal Pengadaan DAP/Pembagi Air
5.2.3.08.09.	Belanja Modal Pengadaan Selang
5.2.3.08.10.	Belanja Modal Pengadaan Garinda
5.2.3.08.11.	Belanja Modal Pengadaan Steam
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5.2.3.09.01.	Belanja modal Pengadaan penggiling hasil pertanian
5.2.3.09.02	Belanja modal Pengadaan alat pengering gabah
5.2.3.09.03	Belanja modal Pengadaan mesin bajak
5.2.3.09.04	Belanja modal Pengadaan alat penetas
5.2.3.09.05.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian
5.2.3.09.06.	Belanja Modal Pengadaan alat alat pertanian
5.2.3.09.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Peternakan
5.2.3.09.06.	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan
5.2.3.09.09.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Samak Kulit
5.2.3.09.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengering Centrifugal
5.2.3.09.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Pertanian Lainnya
5.2.3.09.12.	Chain saw
5.2.3.09.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Pumpur
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin ukir
5.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung
5.2.3.10.03.	Belanja modal Pengadaan mesin stenografi
5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy
5.2.3.10.05.	Belanja modal Pengadaan mesin cetak
5.2.3.10.06.	Belanja modal Pengadaan mesin jilid
5.2.3.10.07	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas
5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas
5.2.3.10.09.	Belanja modal Penyediaan papan tulis elektronik
5.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik
5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Genset ✓
5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Peta Wisata
5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan
5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Sumur
5.2.3.10.16.	Belanja Pengadaan Peralatan SAP
5.2.3.10.17	Belanja Modal Pengadaan AC
5.2.3.10.18.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Infocus dan Perengkapannya
5.2.3.10.19.	Belanja Modal Pengadaan OHP dan perengkapannya
5.2.3.10.20	Belanja Modal Pengadaan Pembelian Webcam
5.2.3.10.21	Belanja Modal Pengadaan Mesin Rumpuk
5.2.3.10.22	Belanja Modal Pengadaan Barang Inventaris
5.2.3.10.23	Belanja Modal Pengadaan Perforator
5.2.3.10.24	Tangga Sierga Lipat
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor ✓
5.2.3.11.01	Belanja modal Pengadaan meja gambar
5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan zimani
5.2.3.11.03	Belanja modal Pengadaan brankas
5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan Niling kabinet

5.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board
5.2.3.11.06	Belanja modal Pengadaan panunjuk waktu
5.2.3.11.07	Belanja modal Pengadaan Pengaman Kantor
5.2.3.11.08.	Belanja modal Pengadaan Pinlu
5.2.3.11.09	Belanja modal Perlengkapan Bangsal
5.2.3.11.10	Belanja modal Alat penerangan
5.2.3.11.11	Belanja modal Pengadaan Bendera/Umbul Umbul ✓
5.2.3.11.12.	Belanja modal Pengadaan Kartu Absensi
5.2.3.11.13.	Belanja modal Pengadaan Rumah Tangga ✓
5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Gorden ✓
5.2.3.11.15.	Belanja modal Pengadaan Sarung Kursi
5.2.3.11.16	Belanja modal Pengadaan Kolak
5.2.3.11.17	Belanja modal Pengadaan AC/Pendingin Ruangan
5.2.3.11.18	Belanja Modal Pengadaan Kerpai
5.2.3.11.19.	Belanja modal pengadaan Pagarwal Telepon
5.2.3.11.20	Belanja Modal Pengadaan Faximilo
5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Pendukung IATG
5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Balai Penyuluhan KB Kecamatan
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner
5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display
5.2.3.12.07.	Belanja modal Pengadaan CPU
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (Rash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan ja.ingan komputer
5.2.3.12.11.	Belanja modal Pengadaan software/sistem aplikasi komputer
5.2.3.12.12.	Belanja modal Pengadaan Peralata internet
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan meubelar
5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja ✓
5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat
5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja
5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat
5.2.3.13.06.	Belanja Modal Pengadaan Kuni Makan
5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur
5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa
5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/timbangan
5.2.3.13.10.	Belanja Modal pengadaan meja komputer
5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Buffet
5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Podium
5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Rak
5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Papan Preparasi
5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Meubelar Puskesmas
5.2.3.13.16.	Belanja modal Pengadaan kursi sekolah
5.2.3.13.17.	Belanja modal Pengadaan meja sekolah
5.2.3.13.18.	Belanja modal Pengadaan kursi tamu
5.2.3.13.19.	Belanja modal Pengadaan meja tamu
5.2.3.13.20.	Belanja modal Pengadaan papan tulis/white board
5.2.3.13.21	Belanja modal pengadaan meubelar Sekolah

5.2.3.13.22	Belanja Modal Pengadaan Almar
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5.2.3.14.01	Belanja modal Pengadaan tabung gas
5.2.3.14.02	Belanja modal Pengadaan kompor gas
5.2.3.14.03	Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan
5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan dispenser
5.2.3.14.05	Belanja modal Pengadaan kulka
5.2.3.14.06	Belanja modal Pengadaan rak piring
5.2.3.14.07	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sandok/gasrpu/pisau
5.2.3.14.08	Belanja Tempat Bahan Makanan
5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Bahan Makanan
5.2.3.14.09	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Memasak
5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci
5.2.3.14.11.	Belanja modal Pengadaan rice cooker
5.2.3.14.12	Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5.2.3.15.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias
5.2.3.15.02.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/maja
5.2.3.15.03	Orn.
5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan
5.2.3.15.04	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Meja Makan
5.2.3.15.04	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Meja Makan
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera
5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam
5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor
5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Mikrolon
5.2.3.16.06	Belanja modal Pengadaan televisi
5.2.3.16.07	Belanja modal Pengadaan Digital / Recieve.
5.2.3.16.08.	Belanja Modal Penyediaan Megapon
5.2.3.16.09.	Belanja modal Pengadaan tape recorder/VCD player/DVD player
5.2.3.16.10.	Belanja modal Pengadaan sound system
5.2.3.16.11	Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen
5.2.3.16.12.	Belanja modal pembuatan film
5.2.3.16.13.	Belanja modal Pengadaan wireless
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan telepon
5.2.3.17.02	Belanja modal Pengadaan faksimili
5.2.3.17.03	Belanja modal Pengadaan radio SSB
5.2.3.17.04	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan radio VHF
5.2.3.17.06	Belanja modal Pengadaan radio UHF
5.2.3.17.07	Belanja modal Pengadaan alat sandi
5.2.3.17.08.	Belanja modal Pengadaan telepon seluler
5.2.3.17.09	Belanja modal Pengadaan pemancar dan perlengkapannya
5.2.3.17.10.	Belanja Modal Pengadaan Media Pengumuman
5.2.3.17.11	Belanja Modal Pengadaan Papan Bahit
5.2.3.17.14	Belanja Modal Pengadaan Radio Komunikasi dan Perlengkapannya
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
5.2.3.18.01	Belanja modal Pengadaan timbangan
5.2.3.18.02.	Belanja modal Pengadaan teodolite
5.2.3.18.03.	Belanja modal Pengadaan alat uji emisi

5.2.3.18.04	Belanja modal Pengadaan alat GPS
5.2.3.18.05	Belanja modal Pengadaan kompas/beralasan navigasi
5.2.3.18.06	Belanja modal Pengadaan busur ukur
5.2.3.18.07	Belanja modal Pengadaan barometer
5.2.3.18.08	Belanja modal Pengadaan telemetri
5.2.3.18.09	Belanja modal Pengadaan ultrasonografi
5.2.3.18.10	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kandasan Dermotor
5.2.3.18.11	Belanja Modal Pengadaan Meteran
5.2.3.18.12	Belanja Modal Pengadaan Alat Diakses Bawah Air
5.2.3.18.13	Belanja modal Pengadaan termometer
5.2.3.18.14	Belanja modal Pengadaan stopwatch
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5.2.3.19.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
5.2.3.19.02	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi
5.2.3.19.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata
5.2.3.19.04	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran jiwa
5.2.3.19.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah
5.2.3.19.06	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak
5.2.3.19.07	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
5.2.3.19.08	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin
5.2.3.19.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi
5.2.3.19.10	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran neurologi
5.2.3.19.11	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi
5.2.3.19.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan
5.2.3.19.13	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi
5.2.3.19.14	Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/temas
5.2.3.19.15	
5.2.3.19.15	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Fisioterapi
5.2.3.19.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Perlengkapan Kedokteran
5.2.3.19.17	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Radiologi
5.2.3.19.18	Belanja Modal Sarana Pelayanan RS
5.2.3.19.19	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Incubator
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5.2.3.20.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi
5.2.3.20.02	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi
5.2.3.20.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia
5.2.3.20.04	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian
5.2.3.20.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan
5.2.3.20.06	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan
5.2.3.20.07	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan
5.2.3.20.08	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa
5.2.3.20.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat pengajaran/praktik sekolah
5.2.3.20.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium
5.2.3.20.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan
5.2.3.20.11	Dst .....
5.2.3.20.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat Keselamatan
5.2.3.20.13	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Komputer
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan
5.2.3.21.02	Belanja modal Pengadaan transmisi jalan lay over
5.2.3.21.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan under pass
5.2.3.21.04	Belanja modal Pengadaan sarana prasarana jalan
5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar
5.2.3.21.07	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Prasarana Pendidikan
5.2.3.21.08	Belanja Modal Konstruksi Sarana dan Prasarana Perumahan
5.2.3.21.09	Belanja Modal Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
5.2.3.21.10	Belanja Modal Pengadaan Piang Tanah
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5.2.3.22.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan gantung
5.2.3.22.02	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan ponton
5.2.3.22.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang
5.2.3.22.04	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan dilas air
5.2.3.22.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambat Kapal Nolayan
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.3.23.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan
5.2.3.23.02	Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk
5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
5.2.3.23.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah
5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
5.2.3.23.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir
5.2.3.23.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air
5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Tluk Air
5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pengaman Pantai
5.2.3.23.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sungai
5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Drainase
5.2.3.23.13.	Belanja Modal Pengadaan Jetty
5.2.3.23.14.	Belanja Modal Pengadaan Baja Tahan Api/Tahan Panas dan Perlindungan Pemadam Kebakaran
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
5.2.3.24.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan
5.2.3.24.02.	Belanja modal Pengadaan lampu hias taman
5.2.3.24.03.	Belanja modal Pengadaan lampu pemering hutan kota
5.2.3.24.04.	Belanja modal Pengadaan lampu jalan
5.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Taman dan Tanaman Pelindung
5.2.3.24.06.	Belanja Modal Pengadaan Pengantian KWH Meter
5.2.3.24.07.	Belanja Modal Pengadaan Pemasangan Arus Listrik
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
5.2.3.25.02.	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
5.2.3.25.03.	Dst.....
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian <sup>1</sup> Bangunan
5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.2.3.26.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
5.2.3.26.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
5.2.3.26.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah
5.2.3.26.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen
5.2.3.26.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi tiang penyalur
5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Gunung Perikanan
5.2.3.26.09.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah
5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Bangunan Taman
5.2.3.26.11	Belanja modal Pengadaan konstruksi bangunan Pasar
5.2.3.26.12	Belanja modal Pengadaan konstruksi Tempat Ibadah
5.2.3.26.13.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Tempat Wisata
5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Pelelangan Ikan

5.2.3.26.15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar
5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Sekolah
5.2.3.26.17	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan Pengolahan Sampah
5.2.3.26.18	Belanja Modal Pengadaan Papan Billboard
5.2.3.26.19	Belanja Modal Pengadaan Pal Gelas
5.2.3.26.20	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung terminal
5.2.3.26.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pelabuhan/Dermaga
5.2.3.26.22	Belanja Modal Pengadaan kandang
5.2.3.26.23	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat pelepasan ikan
5.2.3.26.24	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sarana pasar
5.2.3.26.25	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung pusat perdagangan
5.2.3.26.26	Belanja modal Pengadaan konstruksi taman
5.2.3.26.27	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung pusat hiburan rakyat
5.2.3.26.28	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sarana ibadah
5.2.3.26.29	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sarana olahraga
5.2.3.26.30	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung pengelolaan waste management
5.2.3.26.31	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung asrama
5.2.3.26.32	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sarana industri
5.2.3.26.33	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian hall
5.2.3.26.35	Belanja Modal Pemagaran
5.2.3.26.36	Belanja Modal Pembangunan Kebun
5.2.3.26.37	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Perumahan
5.2.3.26.37	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung SMP/ sederajat
5.2.3.26.38	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung SMU/ sederajat
5.2.3.26.39	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sarana pendidikan tinggi
5.2.3.26.40	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sarana pendidikan luar biasa
5.2.3.26.41	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung diklat/ kursus
5.2.3.26.42	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung pendidikan
5.2.3.26.42	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian dermaga
5.2.3.26.43	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung panji jompo
5.2.3.26.44	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Gerasi
5.2.3.26.45	Belanja Modal Pembangunan Sumur Resapan
5.2.3.26.46	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah
5.2.3.26.47	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Air
5.2.3.26.48	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.3.26.49	Belanja Modal Konstruksi Rumah Jaga
5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5.2.3.27.01	Belanja modal Pengadaan buku matematika
5.2.3.27.02	Belanja modal Pengadaan buku fisika
5.2.3.27.03	Belanja modal Pengadaan buku kimia
5.2.3.27.04	Belanja modal Pengadaan buku biologi
5.2.3.27.05	Belanja modal Pengadaan buku biografi
5.2.3.27.06	Belanja modal Pengadaan buku geografi
5.2.3.27.07	Belanja modal Pengadaan buku astronomi
5.2.3.27.08	Belanja modal Pengadaan buku arkeologi
5.2.3.27.09	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra
5.2.3.27.10	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan
5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan buku seni
5.2.3.27.12	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya
5.2.3.27.13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
5.2.3.27.14	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial
5.2.3.27.15	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan
5.2.3.27.16	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi

5.2.3.27.17.	Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia
5.2.3.27.18.	Belanja modal Pengadaan buku kemus bahasa
5.2.3.27.19.	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan
5.2.3.27.20.	Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan
5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
5.2.3.27.22.	Belanja modal Pengadaan buku naskah
5.2.3.27.23.	Belanja modal Pengadaan lembaran bertata (Jurnal, Compact Disk)
5.2.3.27.24.	Belanja modal Pengadaan mikrofilm
5.2.3.27.25.	Belanja modal Pengadaan peta/Watas/globe
5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Mewarnai Hewan
5.2.3.27.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku Mewarnai Bunga
5.2.3.27.28.	Belanja Modal Pengadaan Buku Mewarnai Alat Transportasi
5.2.3.27.29.	Belanja Modal Pengadaan Buku Mengenai Angka
5.2.3.27.30.	Belanja Modal Pengadaan Buku Mengenai Huruf Kapital
5.2.3.27.31.	Belanja Modal Pengadaan Buku Mengenai Huruf Kecil
5.2.3.27.32.	Belanja Modal Pengadaan Buku IPA/P.B. Sains
5.2.3.27.33.	Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Aksara Lampung
5.2.3.27.34.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peluang Pariwisata
5.2.3.27.35.	Belanja Modal Pengadaan Buku Perikanan
5.2.3.27.36.	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan
5.2.3.27.37.	Belanja Modal Desain
5.2.3.27.38.	Belanja Modal Study
5.2.3.27.39.	Belanja Modal Masterplan
5.2.3.27.40.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kewarganegaraan
5.2.3.27.41.	Belanja Modal Pengadaan Buku Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan
5.2.3.27.42.	Belanja Modal Pengadaan Buku Mata Pelajaran
5.2.3.27.43.	Belanja Modal Pengadaan Buku JASEN
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan lukisan/foto
5.2.3.28.02.	Belanja modal Pengadaan patung
5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan ukiran
5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan pahatan
5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan batu alam
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan meka/miniat/diorama
5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Pot Bunga
5.2.3.28.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kesenian
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan hewan kebun binatang
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan lemak
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan lanaman
5.2.3.29.04.	Det.....
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan senjata api
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan radar
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan mobil water canon
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan borgol
5.2.3.30.05.	Belanja modal Pengadaan sangkur/bayonet
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan perisai/temeng
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan detektor logam
5.2.3.30.08.	Belanja modal Pengadaan rompi anti peluru
5.2.3.30.09.	Belanja modal Pengadaan penhurjan
5.2.3.30.10.	Belanja modal Pengadaan helm
5.2.3.30.11.	Belanja modal Pengadaan silang/sitena

5.2.3.30.12	Belanja modal Pengadaan sentolopi/sehler
5.2.3.30.13	Belanja Modal Pengadaan Serung Tangan
5.2.3.30.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Selam
5.2.3.30.15	Belanja Modal Pengadaan Teropong
5.2.3.30.16	Belanja Modal Pengadaan Papan Selancar
5.2.3.30.18	Belanja modal Pengadaan baju pelampung/pelampung
5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Display
5.2.3.31.01	Belanja Modal Pengadaan Billboard
5.2.3.31.02	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Lainnya
5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/ Pertukangan
5.2.3.32.01	Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/ Pertukangan
5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga
5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga
5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek
5.2.3.34.01	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek
5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran
5.2.3.35.01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran
5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Alat Perangkap
5.2.3.36.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat Tangkap lemak
5.2.3.36.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat Tangkap Satwa Liar
5.2.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
5.2.3.37.01.	Belanja Modal Pengadaan Traffic Light
5.2.3.37.02.	Belanja Modal Pengadaan Warning Light
5.2.3.37.03.	Belanja Modal Pengadaan Halte
5.2.3.38.	Belanja Modal BLUD
5.2.3.38.01.	Belanja Modal BLUD.
5.2.3.39.	Belanja Modal Dari Dana DAK
5.2.3.39.01.	Belanja Modal DAK
5.2.3.40.	Belanja Modal Dari Dana Pendamping DAK
5.2.3.40.01.	Belanja Modal Pendamping DAK
5.2.3.41.	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Industri
5.2.3.41.01.	Belanja Modal Mesin Packing
5.2.3.41.02	Belanja Modal Palet Kayu
5.2.3.42	Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Bermain
5.2.3.42.01	Belanja Modal Pengadaan Alat Bermain TK
5.2.3.44.	Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian
5.2.3.44.01.	Pengadaan Kelengkapan Penyuluh Pertanian

**BUPATI PESISIR BARAT,**

**AGUS ISTIQLAL**